STRATEGI CAPACITY BUILDING DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI DI NAGARI PERSIAPAN TANJUNG BERINGIN UTARA DAN SELATAN KABUPATEN PASAMAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Tim Penguji Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIS UNP Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)



NOVI ANDZO SILALAHI

17042031/2017

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2021

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Capacity Building dalam Meningkatkan

Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari di

ii

Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan

Selatan Kabupaten Pasaman

Nama : Novi Andzo Silalahi

TM/NIM : 2017/17042031

Program Studi : Ilmu Administasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakutas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si

196306171989031003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji
 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administasi Negara
 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pada Hari Senin, 16 Agustus 2021 Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

Strategi Capacity Building dalam Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan Kabupaten Pasaman

Nama TM/NIM : Novi Andzo Silalahi : 2017/17042031

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan Fakultas

: Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2021

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

Ketua

Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si

Anggota

Drs. Syamsir., M.Si., Ph.D

Anggota

Adil Mubarak, S.IP., M.Si

Mengesahkan

Dekan FIS UNP

Dr. Siti Fatimali/M.Pd., M.Hum NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Novi Andzo Silalahi

TM/NIM

: 2017/17042031

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Jurusan

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Strategi Capacity Building dalam meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan nagari di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan Kabupaten Pasaman" adalah benar merupakan benar karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,

METERA TEMPEL
7F7A1AJX278418912

Novi Andzo Silalahi 17042031/2017

ABSTRAK

Novi Andzo Silalahi 2017/17042031 Strategi *Capacity Building* dalam meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan Kabupaten Pasaman

Pembimbing

Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si

Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah masih kurangnya kemampuan aparatur pemerintahan nagari dalaM hal pembelajaran organisasi karena masih minimnya kegiatan peningkatan kemampuan yang dilaksanakan baik secara internal maupun secara eskternal dari Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan peran aktif dari Pemerintah Kabupaten dalam menyikapi hal ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Strategi *Capacity Building* dalam meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan nagari di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan Kabupaten Pasaman, untuk mengidentifikasi faktor penghambat Strategi *Capacity Building* dalam meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan nagari di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan Kabupaten Pasaman.

Penelitian ini diolah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskritif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik Purposive Sampling sementara data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan untuk teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Strategi Capacity Building dalam meningkatan kemampuan aparatur pemerintahan nagari dapat dikatakan belum optimal dan belum terlaksana seluruhnya karena hanya dilakukan melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dengan perioderisasi minimal sekali dalam setahun dan belum melibatkan partisipasi keseluruhan aparatur pemerintahan nagari. Dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan Kabupaten Pasaman.

Kata kunci: Capacity Building, Kemampuan, Pemerintahan Nagari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi Capacity Building dalam Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan Kabupaten Pasaman".

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Prof. Ganefri Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalankan studi di perguruan tinggi tersebut.
- 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum serta para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
- Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D dan Bapak Drs. Karjuni Dt Maani,
 M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu
 Sosial Universitas Negeri Padang.
- 4. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA).

- 5. Bapak Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si sebagai pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat serta dukungan moral kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Bapak Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D selaku dosen penguji I yang telah memberikan saran dan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
- 7. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran dan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
- 8. Kepada Staf Dosen serta Karyawan/karyawati Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- Staf Dosen serta karyawan/karyawati Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- Pegawai perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial serta Pegawai Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Padang.
- 11. Teristimewa kepada kedua orang tua saya (Bapak Z. Silalahi dan Ibu O. Pasaribu dan seluruh keluarga besar penulis yang penulis cintai dan sayangi yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan moril, materil, serta kasih sayang yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 12. Kepada Bapak Rico Julyandra selaku Kabid Pemerintahan Nagari di Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang telah memberikan informasi dan data dalam pembuatan skripsi ini.

- 13. Kepada Bapak Walinagari dan seluruh perangkat nagari di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan yang telah memberikan informasi dan data dalam pembuatan skripsi ini.
- 14. Kepada William Putra Simbolon yang telah memberikan dukungan, semangat doa, dan cinta sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 15. Kepada Adekku Silvia Marina Putri dan Septi Adelia Putri yang telah meluangkan waktu dan tenaga selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 16. Kepada Teman-teman seperjuangan Fenni Hasanah, Winda Pajrianti, Sindi Wulandari, Sri Dasa Putri Wahyuni yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar dengan penulis serta saling berbagi ilmu selama 4 tahun terakhir di Fakultas Ilmu Sosial.
- 17. KepadaKakak Pembimbing setelah Dosen Pembimbing Fahtiaty Mandaita S.Ap dan Desi Marlina S.Ap yang selalu memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 18. Kepada seluruh teman-teman Kos Setia yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa selama penulisan hingga penyelesaian skripsi ini.
- 19. Teman-teman satu pembimbing yang selalu membagi informasi bimbingan dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 20. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Administrasi Publik tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang

membantu dalam proses penyelesaian skripsi, semoga bimbingan saran dan

masukan yang Bapak/Ibu serta rekan-rekan semua menjadi amal Ibadan dan

mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam

penulisan skripsi tentunya masih terdapat banyak kekuarangan, maka penulis

memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk

kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis

Penulis, Agustus 2021

Penulis

Novi Andzo Silalahi

٧

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	х
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	
B. Identifikasi Masalah	
C. Batasan Masalah	
D. Rumusan Masalah	
E. Tujuan Penelitian	
F. Manfaat Penelitian	
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	
1. Konsep Strategi	
2. Konsep Capacity Buil	ding
3. Konsep Kemampuan	
4. Konsep pemerintahan	nagari
B. Penelitian Relevan	
C. Kerangka Konseptual	41
BAB III METODE PENELI	ΓΙΑΝ
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi penelitian	
C. Informan penelitian	
D. Jenis dan sumber data	47
1. Jenis Data	47
2. Sumber Data	48

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	. 49		
F. Teknik Analisis Data	. 52		
G. Uji Keabsahan Data	. 53		
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	. 55		
A. Temuan Umum	. 55		
1. Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan	. 55		
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman	. 66		
B. Temuan Khusus	. 69		
Strategi Capacity Building dalam Meningkatkan Kemampuan Apar Pemerintahan Nagari di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara Selatan Kabupaten Pasaman	dan		
2. Faktor Penghambat Strategi Capacity Building dalam Meningkat Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari di Nagari Persiapan Tanj Beringin Utara dan Selatan Kabupaten Pasaman	jung		
C. Pembahasan	. 97		
Strategi Capacity Building dalam Meningkatkan Kemampuan Apar Pemerintahan Nagari di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara Selatan Kabupaten Pasaman.	dan		
 Faktor Penghambat Strategi Capacity Building dalam meningkat Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari di Nagari Persiapan Tanj Beringin Utara dan Selatan Kabupaten Pasaman. 	jung		
BAB V PENUTUP	109		
A. Kesimpulan	109		
B. Saran	110		
DAFTAR PUSTAKA	111		
LAMPIRAN			

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perangkat Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara	7
Tabel 1.2 Data Perangkat Nagari Persiapan Tanjung Beringin Selatan	8
Tabel 3.1 Informan dalam Penelitian	47
Tabel 4.1 Jumlah penduduk Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan	Selatan
	60
Tabel 4.2 Kegiatan pelatihan oleh pemerintah daerah kabupaten pasaman	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	42
Gambar 4.1 Kantor Walinagari Persiapan Tanjung Beringin Utara	56
Gambar 4.2 Kantor Walinagari Persiapan Tanjung Beringin Selatan	57
Gambar 4.3 Struktur Organisasi	65
Gambar 4.4 Struktur Organisasi	66
Gambar 4.5 Struktur Organisasi	69
Gambar 4.6 Pelatihan Awal Masa Jabatan/Tugas	71
Gambar 4.7 Bimtek Penyusunan dan Pemuktahiran Data Profil Nagari	72
Gambar 4.8 Pelatihan Siskuedes	74
Gambar 4.9 Pelatihan Sistem Informasi Aset Nagari (SIPADES)	75
Gambar 4.10 Pelatihan Website Nagari Dengan Aplikasi Open SID	76
Gambar 4.11 Pelatihan Penyusunan Kajian Resiko Bencana	78
Gambar 4.12 Bimbingan Teknis PBB-P2	80
Gambar 4.12 Sosialisasi PBB-P2	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Nagari sebagai unit pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul. Dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari yang menjelaskan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka saat ini desa bukanlah menjadi satu-satunya sasaran yang menjadi motor penggerak pembangunan namun keberadaan desa diartikan lebih luas untuk mengembangkan aspek dan bidang sebagai penunjang keberlangsungan

penyelenggaraan pemerintahan nagari. Dalam hal ini maka salah satu aspek yang menjadi sasaran adalah kemampuan dari aparatur pemerintahan nagari yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan nagari, serta memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga lainnya.

Penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari menekankan penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan nagari. Hal ini dijelaskan dalam pasal 80 huruf (l) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari yang menjelaskan bahwa peningkatan kemampuan aparatur dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah nagari dan lembaga kemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan program pendidikan dalam bentuk izin belajar atau melanjutkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan aparatur serta memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan seperti pelatihan, seminar, lokarya, penyuluhan,dll.

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman memiliki luas wilayah 3.947,63 km². Secara Geografis Kabupaten Pasaman terletak pada 00°55' LU-00°6' LS dan 99°45'-100°21' BT pada ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.912 meter di atas permukaan laut dan dilalui oleh garis equator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Secara

administratif Kabupaten Pasaman memiliki 12 kecamatan antara lain Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Bonjol, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Duo Koto, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Mapat Tunggul, dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.

Wilayah kecamatan Lubuk Sikaping merupakan kecamatan keenam terluas di Kabupaten Pasaman dengan luas wilayah 346,50 km², wilayah kecamatan Lubuk Sikaping merupakan wilayah perbukitan dengan ketinggian 275-2 430 mdpl dari permukaan laut. Secara Geografis Kecamatan Lubuk Sikaping terletak pada 100°02'-100°16' BT dan 00°17'-00°03' LS. Secara administrasi Kecamatan Lubuk Sikaping memiliki batas daerah Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Panti, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bonjol dan Tigo Nagari, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. Secara administratif pemerintahan kecamatan Lubuk Sikaping memiliki enam Nagari antara lain Nagari Tanjung Beringin, Nagari Jambak, Nagari Durian Tinggi, Nagari Pauh, Nagari Air Manggis, dan Nagari Sundatar. Secara keseluruhan Kecamatan Lubuk Sikaping memiliki jumlah penduduk 45.578 jiwa yang terdiri dari 22.608 jiwa laki-laki dan 22.970 jiwa perempuan. Mata pencaharian penduduk umumnya bergerak di sektor pertanian dan perkebunan. Secara umum penduduk di Kecamatan Lubuk Sikaping memeluk agama islam.

Salah satu nagari yang mengalami pemekaran menjadi tiga bagian daerah baru yaitu 1) Nagari Tanjung Beringin Induk; 2) Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara; 3) Nagari Persiapan Tanjung Beringin Selatan. Tata cara dan syarat Pemekaran Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari dalam Pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa pembentukan nagari ditetapkan dengan peraturan daerah mempertimbangkan prakarsa masyarakat nagari, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat nagari, potensi nagari dan kemampuan keuangan nagari. pembentukan Nagari yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam bentuk pemekaran nagari menghasilkan Nagari Induk dan Nagari Persiapan.

Kenagarian Tanjung Beringin memiliki Luas Nagari yaitu 81,83 kilometer persegi, atau 23,62 persen dari luas keseluruhan wilayah Kecamatan Lubuk Sikaping. Kenagarian Tanjung Beringin terdiri dari delapan jorong antara lain Jorong I Pasa Kaciak, Jorong II Kaluai, Jorong III Perumnas, Jorong IV Pasa Benteng, jorong V Tikalak, Jorong VI Batuang Baririk, jorong VII Muaro Mangguang, Jorong VIII Koto Tangah. Secara administrasi Kecamatan Lubuk Sikaping memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Nagari Durian Tinggi, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Ganggo Mudiak, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Jambak, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota. Nagari Tanjung Beringin berpenduduk sekitar 11.633 jiwa per tahun 2020 terdiri dari 5.531 laki-laki dan 6.102 perempuan. Mata pencaharian penduduk di

Kenagarian Tanjung Beringin antara lain petani, pedagang, PNS, dan pekerja serabutan namun umunya masih didominasi oleh sektor perkebunan dan pertanian. Masyarakat nagari tanjung beringin 99.50 % mayoritas pemeluk agama islam dan 0,50 % lainnya beragama nasrani yang merupakan penduduk pendatang dari provinsi tetangga sumatera utara.

Nagari Tanjung Beringin mengalami pemekaran yang menghasilkan dua nagari persiapan yaitu Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Nagari Persiapan Tanjung Beringin Selatan. Sebab utama yang menjadi dasar dilakukannya pemekaran nagari antara lain cakupan wilayah Nagari Tanjung Beringin yang cukup luas sehingga jarak tempuh ke nagari cukup jauh dan memakan waktu yang lama, meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih optimal karena masyarakat lebih mudah untuk mengakses ke kantor wali nagari, pelayanan juga lebih cepat karena jumlah masyarakat yang akan dilayani lebih sedikit, setiap nagari yang dimekarkan akan menerima anggaran yang nantinya anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Namun dalam pemekaran ini memiliki beberapa keterbatasan dimana belum tersedianya anggaran yang dipergunakan untuk mengembangkan nagari dan meningkatkan kemampuan aparatur nagari karena anggaran yang tersedia hanya terfokus pada gaji pegawai dan operasional kantor sehingga fokus kegiatan hanya dibidang pelayanan dan pemerintahan.

Peningkatan kapasitas/kemampuan menjadi hal yang sangat penting dilaksanakan. Dalam hal ini diperlukan adanya kapasitas perangkat nagari

yang memadai karena tanpa kapasitas yang memadai maka secara tidak langsung aparatur dikatakan gagal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kemampuan yang dimaksud antara lain kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti bidang pemerintahan, bidang pelayanan, bidang perencanaan pembangunan, bidang keuangan dan aset. Menurut Darmansyah,dkk (2019:161) salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan kinerja organisasi dapat diperoleh melalui program pelatihan, pendidikan dan pengembangan. Namun disisi lain Pemerintah Daerah belum optimal dalam dalam melaksanakan program pendidikan, pelatihan, baik itu pendidikan formal, perjenjangan, dan keterampilan serta fungsional. Hal ini dapat dilihat dari selama 3 tahun berjalan belum ada pelatihan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah secara khusus untuk keseluruhan perangkat nagari, adapun pelatihan diadakan minimal sekali yang diperuntukan bagi bidang-bidang khusus, adapun dalam setahun pelatihan yang pernah diikuti antara lain pelatihan manajemen pajak, pelatihan siskudes (sistem informasi keuangan desa), pelatihan bimtek kearsipan, dan pelatihan manajemen aset.

Permasalahan yang dirasakan mengenai kapabilitas aparatur itu kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur itu sendiri. Dimana nagari yang menjadi ujung tombak pemerintahan di Sumatera Barat yang bersentuhan langsung dengan aktivitas kehidupan masyarakat memerlukan tenaga yang cukup banyak untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan nagari. Namun berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan peneliti ditemukan

bahwa pada umumnya perangkat nagari direkrut bukan dari kalangan PNS namun dari kalangan masyarakat yang tentunya belum berpengalaman dengan jenjang pendidikan yang beragam.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan aparatur nagari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya salah satunya adalah tingkat pendidikan dimana tingkat pendidikan yang rendah akan berpengaruh pada kemampuan aparatur nagari. Berdasarkan hasil Observasi awal yang dilakukan oleh penulis pada 25 Januari 2021 ada beberapa permasalahan dalam penyelengaraan pemerintahan nagari, salah satunya yaitu kemampuan aparatur yang belum memadai. Tabel 1 berikut merupakan daftar tingkat pendidikan perangkat nagari persiapan tanjung beringin utara kabupaten pasaman.

Tabel 1.1 Data Perangkat Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara

No	Jabatan	Pendidikan
1.	Pj. Wali Nagari	S 1
2.	Sekretaris Nagari	S 1
3.	Kasi Pemerintahan	SMA
4.	Kasi Kesra dan Pelayanan	SMK
5.	Kaur Keuangan	S 1
6.	Kaur Umum dan Perencanaan	SMA
7.	Staf Kasi Pemerintahan	SMA
8.	Staf Kasi Kesra dan Pelayanan	SMA
9.	Staf Kaur Keuangan	S1
10.	Staf Kaur Umum dan	SMP
	Perencanaan	
11.	Kepala Jorong I	S1
12.	Kepala Jorong II	SMK
13.	Kepala Jorong III	SMK

Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Tabel 1.2 Data Perangkat Nagari Persiapan Tanjung Beringin Selatan

No	Jabatan	Pendidikan
1.	Pj. Wali Nagari	S 1
2.	Sekretaris Nagari	SMK
3.	Kasi Pemerintahan	SMK
4.	Kasi Kesra dan Pelayanan	S 1
5.	Kaur Keuangan	S 1
6.	Kaur Umum dan Perencanaan	SMA
7.	Staf Kasi Pemerintahan	SMP
8.	Staf Kasi Kesra dan Pelayanan	SMK
9.	Staf Kaur Keuangan	SMK
10.	Kepala Jorong VI	Paket C
11.	Kepala Jorong VII	SMA
12.	Kepala Jorong VIII	SMK

Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Berdasarkan kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan perangkat nagari bisa dikatakan masih belum memadai, dimana tamatan SMA/SMK lebih mendominasi dari pada tamatan S1 dan masih ada pula yang tamatan SMP dan Paket C. Dalam hal ini banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan aparatur bukan hanya dari segi pendidikan, namun juga dilihat dari pengetahuan dan pengalaman aparatur. Disamping itu masih terdapat beberapa aparatur yang belum memahami dengan jelas tugas pokok dan fungsinya karena pada saat penerimaan pegawai aparatur ditempatkan tidak didasarkan pada kualifikasinya namun jabatan diisi secara bebas dan sesuai dengan minat calon aparatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing aparatur.

Permasalahan lain yang ditemui oleh peneliti yaitu peran Pemerintah Daerah yang belum proaktif dalam memfasilitasi kegiatan pelatihan sehingga belum adanya pelatihan dan diklat teknis yang dilaksanakan Pemerintah Daerah secara keseluruhan untuk perangkat nagari. Adapun pelatihan yang dilakukan biasanya diawal tahun dan hanya dilaksanakan minimal sekali dalam setahun. Sehingga bisa dikatakan sangat minim dan pelatihan yang diberikan umumnya terfokus untuk Nagari Tanjung Beringin Induk sedangkan untuk Nagari Persiapan biasanya diutus satu orang perwakilan dari bidang khusus. Pelaksanaan kegiatan pelatihan juga hanya diberikan secara teknis sehingga tujuannya tidak jelas dan tingkat ketercapaian kemampuan aparatur pemerintahan nagari bisa dikatakan minim dan jauh dari harapan.

Selanjutnya belum dilaksanakannya peningkatan kemampuan aparatur dari nagari persiapan sendiri hal ini disebabkan belum adanya anggaran yang tersedia untuk mengadakan kegiatan pelatihan secara formal. Jika pelatihan mengundang narasumber dari Pemerintah Kabupaten tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit sementara dana yang tersedia hanya diperuntukkan untuk dana operasional kantor dan gaji pegawai. Sementara dari Pemerintah Kabupaten juga terkendala minimnya dana untuk mengangarkan program pelatihan sehingga Pemerintah Kabupaten tidak bisa mengadakan kegiatan pelatihan sesering mungkin karena dana yang tersedia untuk mengadakan pelatihan sangat terbatas dan kalaupun DPM memfasilitasi pelatihan untuk nagari peserta pelatihan dibatasi perwakilan satu orang dari bidang khusus hal ini selain dikarenakan keterbatasan dana juga keterbatasan narasumber yang tidak sebanding dengan jumlah nagari yang menjadi peserta pelatihan.

Lebih lanjut seperti yang dikemukakan oleh Maani (2014:63) yang menyatakan bahwa secara umum kondisi aparatur pemerintahan nagari

khususnya di Sumatera Barat belum proporsional dari segi kelembagaan dan jumlah aparatur hal ini dikarenakan kualitas aparatur belum memadai, sistem dan prosedur kerja yang belum optimal, tingkat akuntabilitas aparatur masih rendah, pengawasan yang dilakukan belum efektif serta pelayanan belum sesuai dengan kehendak masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Bapak M. Ichsan Efriananda selaku Sekretaris Nagari yang menyatakan bahwa:

"...Hingga saat ini Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun namun belum adanya kegiatan dilaksanakan peningkatan kemampuan yang dengan melibatkan keseluruhan aparatur sehinggga terdapat beberapa aparatur yang belum memahami mengenai tupoksi dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang diembannya, hal ini terjadi karena kurangnya peran aktif dari Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan nagari selain itu nagari persiapan sendiri belum pernah mengadakan kegiatan peningkatan kemampuan hal ini terkendala karena belum adanya anggaran yang diperuntukkan untuk mengadakan kegiatan tersebut. Untuk koordinasi antara stakeholder dengan nagari persiapan/pemekaran terutama mengenai program pemerintah daerah masih lemah karena masih terpusat di nagari induk. (wawancara, 25 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan penulis dapat dilihat masih terdapat beberapa permasalahan nagari seperti Masih kurangnya Peran aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari, lemahnya koordinasi antara stakeholder dengan nagari persiapan/pemekaran terutama mengenai program pemerintah daerah karena masih terpusat di nagari induk sehingga alur informasi dari nagari induk ke nagari persiapan masih sangat lambat, masih

kurangnya kemampuan aparatur pemerintahan nagari dalam hal pembelajaran organisasi sehingga lemahnya penguatan kelembagaan nagari karena belum adanya pelatihan yang dilaksanakan pemerintah daerah secara khusus untuk perangkat nagari.

Dari berbagai permasalahan tersebut, maka diperlukan Strategi Capacity Building untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan nagari. Secara umum Capacity Building merupakan suatu proses untuk membangun kapasitas individu, kelompok maupun organisasi. Selain itu Capacity Building dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok dan organisasi yang tercermin melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat serta penguasaan berbagai kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi sehingga bisa bertahan dan siap untuk menghadapi tantangan yang terjadi secara cepat dan tidak terduga. Menurut Morgan dalam (Alam:2015:95) yang merumuskan tentang kapasitas organisasi sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya dan kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor dan sistem yang dipilih dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Selanjutnya UNDP dalam (Alam:2015:95) mendefinisikan pengembangan kapasitas sebagai proses yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, institusi ataupun masyarakat untuk meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan kinerja sesuai tugas dan fungsi, memecahkan persoalan, merumuskan dan

mewujudkan tujuan sesuai dengan rencana, serta memenuhi kebutuhan pembangunan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut Morison (2001:42) dalam (Damayanti,2014:465) menyatakan bahwa *capacity building* sebagai proses yang dilakukan melalui serangkaian gerakan, perubahan yang bersifat multilevel yang terjadi didalam individu, kelompok, organisasi dan sistem dalam rangka memperkuat kemampuan adaptasi individu dan organisasi sehingga dapat menumbuhkan aksi cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan. Morison (2001:23) juga menyatakan bahwa *capacity building* memiliki tujuan yaitu untuk mengurangi ketidaktahuan dalam hidup dan mengembangkan kemampuan untuk dapat beradaptasi menghadapi tantangan perubahan yang bisa terjadi setiap waktu. Dari tujuan tersebut dapat diketahui bahwa *capacity building* memberikan gambaran agar dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia terutama pegawai sehingga dapat berkontribusi secara nyata dalam pengembangan kemampuan kolektif organisasi yang mengharapkan terwujudnya kinerja yang baik sebagaimana mestinya.

Selain itu upaya pengembangan kapasitas dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan nagari dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang terfokus pada tiga dimensi yang hendak dicapai sesuai dengan konsep *Capacity Building* menurut Grindle (1997:1-28) dalam Maani (2014:65) antara lain : a) pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berfokus pada pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan teknis dapat dilakukan dengan

pendidikan dan latihan (training), pemberian gaji atau upah, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja serta rekruitmen yang tepat; b) penguatan organisasi, yang berfokus pada tata manajemen sebagai upaya peningkatan peran dan fungsi dengan pemberian insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, dan struktur manajerial; c) reformasi kelembagaan, yang berfokus pada kelembagaan dan sistem serta makro struktur dengan aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi.

Oleh karena itu penting bagi Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan *Capacity Building* sebagai sarana untuk memperbaiki dan memperbarui sistem yang ada agar lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu diharapkan menghasilkan output atau hasil berupa : 1) Peningkatan Peran aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari;2) peningkatan kemampuan aparatur Pemerintahan Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan dalam hal pembelajaran organisasi untuk penguatan organisasi kelembagaan pemerintahan nagari; 3) peningkatan koordinasi antara stakeholder dengan Nagari Persiapan/Pemekaran terutama mengenai program Pemerintah Daerah; 4) peningkatan kontribusi Nagari Tanjung Beringin Induk dalam hal pelatihan dan bimbingan secara formal untuk Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari.

Berdasarkan permasalahan diatas perlu dilakukan penelitian tentang "Strategi Capacity Building dalam Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan Kabupaten Pasaman".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- Masih kurangnya peran aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari.
- Belum adanya kegiatan peningkatan kemampuan secara internal dari Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan
- Masih kurangnya kontribusi Nagari Tanjung Beringin Induk dalam hal pelatihan dan bimbingan secara formal untuk Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari..
- 4. Masih lemahnya koordinasi Pemerintah Daerah dengan nagari persiapan/pemekaran terkait program pemerintah daerah.
- Masih kurangnya kemampuan aparatur Pemerintahan Nagari Persiapan
 Tanjung Beringin Utara dan Selatan dalam hal pembelajaran organisasi
 untuk penguatan organisasi kelembagaan pemerintahan nagari.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyak dan luasnya ruang lingkup permasalahan penelitian ini sehingga penelitian ini bisa fokuskan dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka penulis memberikan batasan masalah hanya pada Strategi

Capacity Building dalam meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan Kabupaten Pasaman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

- 1. Bagaimana Strategi Capacity Building dalam meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan Kabupaten Pasaman?
- 2. Apa saja Faktor Penghambat Strategi Capacity Building dalam meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan Kabupaten Pasaman?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut:

- Mendeskripsikan Strategi Capacity Building dalam meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan Kabupaten Pasaman.
- Mengidentifikasi faktor penghambat Strategi Capacity Building dalam meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan Selatan Kabupaten Pasaman.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

- Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian ilmu Administrasi Publik khususnya dibidang Pemerintahan Nagari
- Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi :
 - a) Pemerintahan nagari, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan masukan bagi lembaga terutama pada Pemerintahan nagari.
 - b) Pengambil kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan sebagai rekomendasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pemerintahan nagari.
 - c) Peneliti lanjutan, hasil penelitian ini dapat jadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.